



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Blok C No.20 Kompleks SKPD
SULAWESI SELATAN
Telp./Fax 04213590015 email : itdasidrap@gmail.com

Pangkajene Sidenreng, 28 Agustus 2023

Nomor : 045.2/ 23/ /Insp

Sifat : **Rahasia**

Yth. Bupati Sidenreng Rappang

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Di

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pangkajene

OPD TA. 2022 pada Perangkat

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Terlampir bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Bupati Sidenreng Rappang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD TA 2022 pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Surat Tugas Inspektur Daerah Sidenreng Rappang Nomor 094/ST.51/Insp, Tanggal 15 Agustus 2023

Demikian untuk diketahui dan bahan seperluhnya.



DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP, M.SI, CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p. : 19710318 199101 1 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
2. Kepala Badan Bappalitbangda Kab. Sidrap di Pangkajene;
3. Kepala Bagian Organisasi di Pangkajene;
4. Masing – masing OPD yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Blok C No. 17 KOMPLEKS SKPD KAB. SIDRAP
SULAWESI SELATAN

TELEPON (0421) 3590015, FAX (0421) 3590015

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 709/ST. 51/INSP Tanggal 15 Agustus 2023 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD TA 2022 pada Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, kami tidak mempunyai hubungan kekerabatan, usaha dan tidak terdapat bantuan kepentingan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan diatas kami menyatakan :

1. Bekerja secara profesional, penuh semangat dan menjunjung tinggi integritas, konsisten serta bertanggung jawab
2. Mengutamakan kepentingan Negara diatas segala kepentingan lainnya
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu
4. Menjaga martabat dan menghindari diri dari perbuatan tercela
5. Tidak menerima segala pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan kewajiban kami menjadi bertentangan dengan pelaksanaan tugas
6. Menjadi teladan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
7. Menjaga rahasia Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 28 Agustus 2023

Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Rohady Ramadhan, S.IP.,M.Si.,CGCAE



Wakil Penanggung Jawab : Firman A, ST.,M.Si



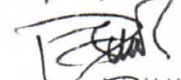
Pengendali Teknis : Jumiati Yafik, SE.M.Adm.Pemb



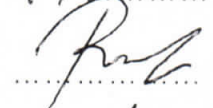
Ketua TIM : Rasniati, SE.M.Si



Anggota Tim : Darma Setiawan, S.Farm.Apt



Anggota Tim : Abd. Rahman Saleh, S.IP



Anggota Tim : Sitti Mutmainna Tahir, SE





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Harapan Baru Blok C No.17 Kompleks SKPD Sidrap 91611, Sul-Sel
Telepon : (0421) 3590015 – Faks : (0421) 3590015

Pangkajene Sidenreng, 28 Agustus 2023

Nomor : 709/ 57- d/INSP Yth. KEPALA BAPPELITBANGDA
Lamp. : 1 (satu) berkas KAB. SIDENRENG RAPPANG
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP DI-
Tahun 2022

Pangkajene Sidenreng

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2022**, pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Atas pelaksanaan evaluasi AKIP yang telah dilakukan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Hukum Evaluasi,

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- d. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
- e. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, dan
- f. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 094/ ST.52/ INSP Tanggal 15 Agustus 2023, perihal Penugasan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Pada OPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

2. Latar Belakang Pelaksanaan Evaluasi AKIP,

Penguatan akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mendorong setiap

perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi,

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) bertujuan untuk,

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP,
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP,
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan
- e. Memonitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi,

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian atas kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai.
- b. Penilaian atas pengukuran kinerja yang dilakukan berjenjang dan berkelanjutan,
- c. Penilaian atas pelaporan kinerja, dan
- d. Penilaian atas evaluasi kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi,

Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan tingkatan evaluasi terbatas, yang menggunakan langkah-langkah menelaah dokumen dan informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIP, melakukan konfirmasi, dan pengujian, serta penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu untuk mengetahui dan menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja.

Metodologi evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metode penilaian kualitatif dan kuantitatif atas 4 komponen penilaian dan 3 sub komponen pada masing-masing komponen yang dihadapkan pada kriteria pemenuhan keberadaan dokumen, kualitas dokumen, dan pemanfaatan atau implementasi dokumen.

6. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022,

1. Identitas Pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

Nama Pimpinan : Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. 1

Nip. : 19721209 199203 1 004

2. Struktur Organisasi,

- o Kepala Badan
- o Sekertaris Dinas, membawahi 3 Sub Bagian, yakni : Sub. Bagian Umum & Kepegawaian, Sub. Bagian Perencanaan, dan Sub. Bagian Keuangan.
- o Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Sosial dan Pembangunan Manusia, membawahi 3 sub bidang yakni . 1) Sub Bidang Perencanaan Bidang SDA; 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia; 3) Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian.
- o Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan, membawahi 3 Sub Bidang yakni : 1). Sub Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur; 2). Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan; 3) Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan.
- o Kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi 3 Sub Bidang yakni : 1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; 2) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

- Kepada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, membawahi 2 Sub Bidang yakni : 1) Sub Bidang Data dan Informasi; 2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
3. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator dan Target Kinerja Pemerintah Daerah yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
- Misi “Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance dan Elektronik Governance”
 - Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah”
 - Indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.
4. Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022,
- Tujuan 1 : Terwujudnya system perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 Indikator Kinerja : 1. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
 2. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD.
- Tujuan 2 : Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan.
 Sasaran 2 : Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.
 Indikator Kinerja : Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan.
5. Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021.
- Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 mendapat nilai sebesar **70,53** atau dikategori **BB (Sangat Baik)**.
6. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022,
- Berdasarkan hasil telaah dokumen dan pengumpulan data dan informasi, dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), namun dalam penerapannya masih dibutuhkan beberapa perbaikan dalam rangka peningkatan implementasi penyelenggaraan SAKIP, bukti penyelenggaraan SAKIP sebagai berikut :
- a. Renstra,
 - b. Perjanjian Kinerja,
 - c. Pengukuran Kinerja,
 - d. Pengelolaan Data Kinerja,
 - e. Pelaporan Kinerja,
 - f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021.

No.	Analisis dan Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja	Tindak Lanjut
1.	Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK dan IKU)	Menyusun indikator pada Dokumen perencanaan kinerja dengan memenuhi kriteria SMART C
2.	Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja	IKU telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
3.	Melakukan perbaikan terhadap dokumen LKj	Informasi tentang evaluasi dan analisis dalam pencapaian kinerja telah dilakukan
4.	Melakukan perbaikan terhadap evaluasi internal	Hasil pemantauan dari rencana aksi sebagai bentuk evaluasi program dan kegiatan dan sebagai langkah perbaikan pada penyusunan dokumen berikutnya
5.	Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.	Telah dilakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja dan sumber data yang digunakan valid

B. Gambaran Hasil Evaluasi

1. Uraian Hasil Evaluasi AKIP,

Rincian hasil evaluasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Tahun	
	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30 %	24,6
b. Pengukuran Kinerja	30 %	23,1
c. Pelaporan Kinerja	15 %	12
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	11,25
Nilai Hasil Evaluasi	100 %	70,95 %
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB
Interpretasi		Sangat Baik

Perolehan nilai komponen tersebut diatas menunjukkan bahwa masih terdapat kriteria atau kondisi yang harus dicapai secara memadai disetiap sub komponen dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP, kriteria sub komponen sebagaimana yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja,

- 1) Sub Komponen Keberadaan, SOP alur perencanaan kinerja dr RPJMD sampai turun jadi LAKIP belum ada.
- 2) Sub Komponen Kualitas, IKU telah menggambarkan kondisi kinerja, RENSTRA/RENJA/Dokumen penjenjangan kinerja telah selaras, dan Pohon kinerja telah menggambarkan hubungan kinerja, strategi & aktivitas antar bidang.

- 3) Sub Komponen Pemanfaatan, DPA/RKA telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dan Penjenjangan pada pohon kinerja mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- b. Pengukuran Kinerja,
- 1) Sub Komponen Keberadaan, IKU belum memuat definisi operasional dan sumber data.
 - 2) Sub Komponen Kualitas, belum ada laporan monev triwulan terkait pengukuran kinerja dan tidak ada dokumentasi rapat2 internal untuk pembahasan kinerja.
 - 3) Sub Komponen Pemanfaatan. Pemanfaatan pengukuran kinerja masih sekedar pemotongan berdasarkan absensi.
- c. Pelaporan Kinerja,
- 1) Sub Komponen Keberadaan, Laporan kinerja yang telah direviu tidak didukung dengan bukti berupa berita acara hasil reviu / evaluasi.
 - 2) Sub Komponen Kualitas, Dokumen pelaporan kinerja telah disusun sesuai standar dan telah memberikan informasi kinerja yang terukur namun belum menguraikan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
 - 3) Sub Komponen Pemanfaatan. Rapat yang membahas terkait laporan kinerja/dialog kinerja belum terdokumentasi.
- d. Evaluasi Kinerja,
- 1) Sub Komponen Keberadaan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
 - 2) Sub Komponen Kualitas, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
 - 3) Sub Komponen Pemanfaatan, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Rekomendasi

Kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan pemenuhan kriteria implementasi SAKIP sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja,
- 1) Sub Komponen Keberadaan, menyusun SOP alur perencanaan kinerja dari RPJMD sampai turun jadi LAKIP.
 - 2) Sub Komponen Kualitas, Dokumen perencanaan kinerja agar menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
 - 3) Sub Komponen Pemanfaatan, membuat laporan monev triwulan atas Rencana aksi kinerja.
- b. Pengukuran Kinerja,
- 1) Sub Komponen Keberadaan, agar IKU menguraikan definisi operasional dan mencantumkan sumber data.
 - 2) Sub Komponen Kualitas, agar melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan membuat laporan monev triwulan serta mendokumentasikan rapat – rapat internal terkait pembahasan kinerja.

3) Sub Komponen Pemanfaatan. Pemanfaatan pengukuran kinerja agar menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan structural/fungsional, *refocusing* organisasi, penyesuaian strategi dan anggaran dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan Kinerja,

- 1) Sub Komponen Keberadaan, agar laporan kinerja yang telah direviu didukung dengan bukti berupa berita acara hasil reviu / evaluasi.
- 2) Sub Komponen Kualitas, agar menguraikan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.
- 3) Sub Komponen Pemanfaatan. Semua rapat yang membahas terkait laporan kinerja/dialog kinerja agar dituangkan dalam bentuk notulen rapat.

d. Evaluasi Kinerja,

- 1) Sub Komponen Keberadaan, agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Sub Komponen Kualitas, agar meningkatkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan terkait evaluasi akuntabilitas kinerja.
- 3) Sub Komponen Pemanfaatan, agar terus meningkatkan implementasi SAKIP dalam mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja.

C. Penutup

1. Simpulan


Dari hasil pejumlahan nilai komponen dan sub komponen yang dilakukan, maka Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa nilai akhir AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 sebesar **70,95** atau dikategori **BB (Sangat Baik)**, dengan interpretasi *"terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/coordinator."*

2. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik.

Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidereng Rappang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dan kerjasama kepada seluruh pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas kesediaannya memberikan data dan informasi yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi AKIP Tahun 2022 Dan Tim evaluasi juga berharap agar rekomendasi evaluasi dapat ditindaklanjuti serta melakukan perbaikan terhadap implementasi SAKIP Tahun 2023 dan menargetkan nilai AKIP Tahun 2023 memperoleh nilai 80-90 sehingga predikat AKIP mendapat nilai **A (Memuaskan)**.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



DR. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710313 199101 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda
5. Peringgal

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/ Satker	Nilai	Catatan	Daftar Evidence
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	B	4,8		
	Kriteria				Belum terdapat Pedoman teknis internal instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Terdapat dokumen Rencana, IKI/Reja, PK dan perubahannya Rencana Simpul jadwal Triwulan, DPA
	1. Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja					
	2. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang					
	3. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah					
	4. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek					
	5. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja					
	6. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja					
	1. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	B	7,2		
	Kriteria					
	1. Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan					
	2. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu					
	3. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai					
	4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai					
	5. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART					
	6. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)					
	7. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis					
	8. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)					
	9. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)					
	10. Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja					
	11. Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja					
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	B	12		
	Kriteria					
	1. Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai					
	2. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai					
	3. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track					
	4. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala					
	5. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya					
	6. Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik					
	7. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
	8. Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan					
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		23,1		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	A	5,4		
	Kriteria				IKI belum memuat definisi operasional dan sumber datanya	1) telah terdapat Formulasi perhitungan pada IKI beserta penanggungjawabnya. 2) terdapat SOP data kinerja
	1. Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja					
	2. Terdapat Definisi, Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja					
	3. Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan					
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	7,2		
	Kriteria					
	1. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja					
	2. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan					
	3. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan					
	4. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala					
	5. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang					
	6. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)					
	7. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)					
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,5		
	Kriteria				Rata-rata sedang pemantauan berdasarkan absensi	Masih pengurangan karena indeksnya belum sampai kinerja
	1. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan					
	2. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional					
	3. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi					
	4. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja					
	5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja					
	6. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja					
	7. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja					
	8. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja					
	9. Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja					
	10. Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja					
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		12		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	B	2,4		
	Kriteria					
	1. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun					
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala					
	3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan					
	4. Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi					
	5. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan					
	6. Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu					
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya	4,50	B	3,6		
	Kriteria					
	1. Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar					
	2. Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja					
	3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan					
	4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah					
	5. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya					
	6. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)					
	7. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan					
	8. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja					
	9. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)					
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	6		
	Kriteria					
	1. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)					
	2. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai					
	3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja					
	4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja					
	5. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja					

6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00			11,25
4 a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	A		4,5
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	A		6,75
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi				
4 c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB		BB
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal				
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				

SOP pedoman teknis Evaluasi AKIP Internal

Dokumen Laporan Evaluasi akuntabilitas kinerja (Langkah kerja (Program Audit)) yang dilakukan evaluator dalam melakukan evaluasi (metodologi, hal hal yang diperiksa)

LHE Tahun Lalu sudah ditindaklanjuti